PENGUATAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN

ANDRIAN SUGANDA

Universitas Islam Indragiri, Tembilahan
ansuganda24@gmail.com

FITRI WAHYUNI

Universitas Islam Indragiri, Tembilahan
fw160586@gmail.com

KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRI

Universitas Islam Indragiri, Tembilahan
novyarsatriawan3@gmail.com

ABSTRAK

Pengamanan merupakan fungsi dari sistem lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimana penguatan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan apa saja yang menjadi hambatan petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan tersebut. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh oleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan sudah sangat sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun hambatan petugas pemasyarakatan dalam Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan antara lain adalah kurangnya jumlah personil petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, kurangnya pos menara penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan jumlah WBP yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, pengamanan, narapidana

ABSTRACT

Security is one of the main functions of the correctional institution system, implemented based on the classification of activities, including prevention, enforcement, and recovery, as regulated by legislation. The research problems in this study are how to strengthen the role of correctional institutions in the implementation of prisoner security at Class IIA Tembilahan Correctional Facility, and what are the detentions faced by correctional officers in implementing such security measures. This study is empirical or sociological legal research with a descriptive-analytical approach. The data used includes primary data obtained from respondents and populations, as well as secondary data in the form of legislation, books, journals, internet sources, and tertiary data such as legal dictionaries and the Indonesian Dictionary. Data collection techniques were conducted through observation and interviews, while data analysis techniques used qualitative analysis with conclusions drawn deductively. The strengthening of the role of correctional institutions in the implementation of prisoner security at Class IIA Tembilahan Correctional Facility has been carried out in accordance with the applicable Standard Operating Procedures and aligns with the mandates of legislation. However, detentions faced in strengthening this function include: insufficient number of security personnel, limited number of guard tower posts, and the correctional facility's capacity, which is inadequate to accommodate the number of inmates exceeding its capacity.

Keywords: *Correctional Institution, security, prisoners*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana yang lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara.¹ Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa petugas Pemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang untuk melaksanakan tugas Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana.³ Pada Pasal 72 dikatakan bahwa “Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengamanan, petugas Pemasarakatan

dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana Pengamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴ Adapun tanggung jawab petugas Lembaga Pemasarakatan itu sendiri adalah menjaga, membimbing dan mengendalikan seseorang yang ditangkap dan sedang menunggu sidang pengadilan ketika seorang terpidana dipenjara atau yang didakwa melakukan tindak pidana dan telah divonis untuk waktu tertentu.⁵

Selanjutnya, dalam menyelenggarakan sistem Pengamanan Lapas, maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya harus ada pengawasan yang baik dalam Lembaga Pemasarakatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm.148

² Fitri Wahyuni, *Tinjauan Terhadap Pembebasan Narapidana Pada Kondisi Covid 19*, jurnal Das Sollen, Vol 4 No 1 tahun 2020, hlm 5.

³ Pasal 1 ayat 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

⁴ Pasal 72 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

⁵ <https://etd.umm.ac.id/3052/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023, Pukul 10.08 WIB.

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁶

Walaupun demikian, tidak selamanya hal yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan akan terlaksana, sehingga tidak semua yang telah dijanjikan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus yang terjadi tepatnya pada tanggal 15 Juni 2021 di dalam Lapas Kelas IIA Tembilahan telah terjadi kaburnya narapidana kasus pencurian yang bernama Anton Bin Suni. Kaburnya narapidana tersebut diduga karena petugas lengah melakukan pengawasan. Hal tersebut menjadi permasalahan nyata bahwasanya masih lemah tingkat pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab oleh lembaga pemasyarakatan.

Pegawai pemasyarakatan juga termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu ketentuan peraturan pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilarang dijatuhi hukuman disiplin.⁷

1.2 Perumusan Masalah

⁶ Sofiani Fajriah, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, Nomor 1 Volume 7, 2019, hlm. 6718.

⁷ Pasal 1 Peraturan-Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagaimana pelaksanaan Penguatan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan dan apa saja yang menjadi hambatan petugas pemasarakatan dalam Penguatan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan.

1.3 Metode Penelitian⁸/Landasan Teoritis

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Suatu penelitian hukum yang memperoleh data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (dassollen) dengan kenyataan (das sein) yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat⁹ mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis.

⁸ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹⁰ observasi dan wawancara.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan cara melakukan analisa deskriptif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang

⁹Bambang Sanggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 36.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 26- 27.

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹¹

II. PEMBAHASAN

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggung jawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.¹²

Pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam kitab Undang-undang hukum pidana dan ketentuan pidana yang lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan

itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.¹³

Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeratan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.¹⁴

Aturan mengenai Sistem Pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat

¹¹ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2021, hlm.15.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 125.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140.

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3.

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pelaksanaan pengamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana. Untuk itu, kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan pengamanan seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ada, maka akan meminimalisir terjadinya kasuskasus yang berkaitan dengan keamanan bagi narapidana. Bagi narapidana yang melakukan pelanggaran, sebaiknya diberikan sanksi tegas.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam melakukan tugas Pengamanannya memiliki 37 orang Petugas Pengamanan, yang dibagi dalam 4 Regu Jaga. Dalam hal Pengamanan, Petugas Pengamanan juga dibantu oleh Piket Staf yang terdiri dari 1

orang, dan Piket Perwira/ Pejabat yang terdiri dari 1 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam hal penjagaan dibagi menjadi 3 shift, yaitu terdiri dari shift pagi pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, shift siang pukul 13.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB, dan shift malam pukul 19.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB.¹⁵

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan memiliki 1021 WBP yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Melihat dari jumlah WBP Lapas Tembilahan sudah sangat melebihi kapasitas. Dimana kapasitas seharusnya hanya untuk 215 WBP, namun sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah memiliki 1021 WBP, yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melebihi kapasitas sebesar 474% WBP. Oleh karena itu, dengan Petugas Pengamanan yang masih sedikit dan WBP yang sudah melebihi kapasitas menyebabkan berlebuhnya tugas menjaga dan mengawasi setiap Petugas Pengamanan. Dimana yang seharusnya Petugas Pengamanan hanya bertugas menjaga dan mengawasi 2 sampai 3 WBP,

¹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Rinaldi R. selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

namun sekarang harus menjaga dan mengawasi lebih kurang 10 WBP.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan Bapak Rinaldi R., pola pengamanan yang akan digunakan di lapas kelas IIA Tembilahan mengatakan bahwa pola pengamanan semula yang akan digunakan di lapas ini adalah *maximum security*. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Rinaldi R. selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu :

“Disini perbandingan jumlah petugas dengan narapidana sangat jauh berbeda, maka dari itu kami memaksimalkan penjagaan dengan dibantu oleh kamera cctv yang berada di sekeliling lapas dan kami pun merasa sangat terbantu dengan adanya kamera cctv karna dapat mempermudah kami untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan dan cctv ini dipantau 24 jam.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024)

Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa pola pengamanan disesuaikan dengan tempat. Misalnya blok hunian khusus tindak pidana narkotika dikategorikan dengan pola pengamanan

maximum security, sementara blok hunian lain di kategorikan *medium security* dan jika di luar tembok pengamanan sudah menggunakan pola pengamanan *minimum security*. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Rinaldi R. selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu:

“kita kategorikan berdasarkan tempat pengamanannya, misalnya di blok meranti, ulin dan jati ini kita terapkan pengamanan Medium, di area depan kantor minimum, sementara di blok mahoni kita terapkan dia pengamanan maximum, pokoknya kita terapkan pengamanan di setiap pos yang ada” (Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024)

Penjelasan dari Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu bapak Daniel A.M. Pasaribu. mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh petugas jaga sebanyak 9 sampai dengan 10 orang petugas dimana pengamanan yang dilakukan di pintu utama di jaga oleh petugas jaga sebanyak 3 orang petugas dan untuk pengamanan pada blok hunian

sebanyak 6 sampai dengan 7 orang petugas setiap harinya. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Daniel A.M. Pasaribu selaku Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu :

“petugas yang menjaga di pintu utama lapas itu sebanyak 3 orang setiap harinya dan pintu utama itu selalu di kunci. Sementara untuk di dalam blok ada sekitar 6 atau 7 orang tergantung regu yang bertugas pada hari itu dan cctv yang ada di lapas ini selalu di pantau setiap harinya. Walaupun sudah ada petugas-petugas khusus keamanan namun para pegawai lapas wajib ikut bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban lapas.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan termasuk ke dalam klasifikasi pengamanan menengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan termasuk kedalam klasifikasi pengamanan menengah karena dalam hal pengamanan ada yang dinamakan dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dinilai dari Narapidana dan juga disesuaikan dengan tahap pembinaannya. Dalam hal penilaian klasifikasi pengamanan berdasarkan asesmen tersebut dibuat oleh Petugas Balai

Pemasyarakatan. Maka oleh karena itu, berdasarkan penilaian dari Petugas Balai Pemasyarakatan terhadap asesmen tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan termasuk ke dalam klasifikasi pengamanan menengah.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan pengamanan Lapas maka Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan, yaitu:

1. Praktik Pencegahan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pengamanan Lapas dan Rutan, bahwa pengamanan Lapas dan Rutan dalam kegiatan pencegahan meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan Intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, serta tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Rinaldi R. selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, selama beliau menjabat sebagai Kepala Pengamanan

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan, beliau mengatakan sudah menjalankan semua kegiatan pencegahan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam praktik pencegahan ada 2 hal yang selalu dijalankan dan ditekankan oleh Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan dan Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan selaku penanggung jawab Pengamanan Lapas. Perhatian khusus tersebut meliputi:

a. Pemeriksaan pintu masuk

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pengamanan Lapas, pemeriksaan pintu masuk yaitu pemeriksaan administrasi yang dilakukan pada orang yang akan memasuki halaman Lapas yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan. Berdasarkan pengamatan penulis pemeriksaan administrasi tersebut sudah dilakukan dan diterapkan pada saat pengunjung sudah memasuki halaman Lapas.

b. Kontrol

Kontrol yaitu serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas Pengamanan yang dilakukan secara rutin oleh Kepala atau Wakil Kepala Regu

Pengamanan. Berdasarkan pengamatan penulis dalam hal kontrol, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan selalu melakukan kontrol pada pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama dan area blok hunian.

2. Praktik Penindakan

Berdasarkan keterangan Bapak Rinaldi R., selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah melaksanakan semua kegiatan penindakan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk praktik penindakan pada kegiatan atau keadaan yang belum pernah terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan. Seperti untuk penindakan terhadap keadaan tertentu, yaitu seperti pemberontakan, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan juga pernah menghadapi Narapidana yang mencoba melarikan diri, Narapidana tersebut juga langsung dapat ditangkap kembali bahkan sebelum mereka dapat melewati blok khusus Narapidana, tetapi hal tersebut juga sangat jarang terjadi. Biasanya tindakan yang diambil untuk Narapidana yang tidak patuh pada tata tertib di Lapas mereka

akan di hukum dengan dipindahkan ke dalam kamar hunian pengasingan atau kamar hunian isolasi/tutupan sunyi. Namun jika berbicara kebelakang, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pernah terjadi kasus kaburnya 1 orang Narapidana kasus pencurian pada tahun 2021. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Agung Satria selaku salah satu petugas keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu:

“Kronologi kasus kaburnya 1 orang narapidana tersebut terjadi pada pukul 5 dini hari pada saat petugas dan beberapa narapidana sedang melaksanakan shalat subuh. Pada saat itu, ternyata narapidana yang melarikan diri tersebut memanfaatkan kelengahan petugas dengan memanjat pagar pembatas blok hunian dan menuju ke arah sudut lapas yang tidak memiliki pos Menara sehingga pelarian tersebut tidak terlihat oleh petugas pengamanan di pos Menara dan petugas pengamanan di blok. Saat kejadian tersebut, jalur pelarian narapidana tersebut tidak dipasang kawat berduri. Namun, saat ini kepala pengamanan sudah menambah kawat berduri di semua sisi pada bangunan lapas guna mengantisipasi kasus serupa.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024)

Pasal 531 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang berbunyi:

“Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah Pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Sementara itu untuk kasus narapidana yang melarikan diri tersebut di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap petugas merupakan suatu indisen dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

3. Praktik Pemulihan

Dalam hal praktik pemulihan, Bapak Rinaldi R. selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, mengatakan bahwa pemulihan yang dijalankan lebih mengutamakan ke pemulihan psikologis Narapidananya, karena selaku petugas mereka telah melakukan penindakan maka

mereka mau lebih menyenangkan dan mengingatkan Narapidana yang melakukan pelanggaran untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Untuk Narapidana yang memiliki luka seperti lebam atau lainnya, maka Narapidana tersebut akan diberi perawatan yang memadai.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam hal praktik pemulihan penulis tidak menemukan hal yang melanggar atau hal-hal yang perlu perhatian khusus, karena menurut penulis praktik pemulihan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Rutan itu sendiri dan sudah sangat sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Para Petugas Pengamanan juga sangat mengetahui betul apa tugas dan kewajiban mereka selaku Petugas Pengamanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah aman dan tertib. Hal tersebut juga didukung oleh 3 Petugas Pengamanan selaku informan yang sejalan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatupun di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Petugas Pengamanan langsung cepat menanggulangnya sehingga masalahnya tidak membesar. Petugas Pengamanan lebih memberikan perhatian khusus kepada Narapidana yang memiliki penyakit bawaan sehingga jika sewaktu-waktu penyakitnya kumat bisa langsung ditangani.

Kasus larinya Narapidana Pencurian yang bernama Anton Bin Suni yang telah penulis bahas di latar belakang merupakan kasus yang terjadi pada masa bapak Rinaldi R. bertugas sebagai Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan baru menjabat selama 6 (enam) bulan, sehingga penyelenggaraan pengamanan yang dulu dengan yang sekarang sedikit atau banyaknya pasti akan mengalami perubahan dan terus melakukan langkah-langkah sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan khususnya dalam hal pelaksanaan pengamanan terhadap narapidana.

Tantangan dan Hambatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bagi terpidana, lembaga pemasyarakatan (kemudian disebut sebagai lapas) sebagai institusi reintegrasi sosial seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di kemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sedia kala sebelum mereka melakukan kesalahan yang menyebabkan masuk penjara. Hal ini selaras dalam apa yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Untuk melaksanakan sistem pengamanan, dibutuhkan keadaan yang kondusif. Namun pada kenyataannya, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam pelaksanaan pengamanan bagi warga binaan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah personil petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Berbicara dari segi kuantitas maka Petugas Pengamanan sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu 37 orang, masih sedikit dalam melaksanakan tugas pengamanan untuk 1021 orang Narapidana.

2. Kurangnya pos menara penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sendiri masih ada yang belum memadai, seperti masih kekurangan Pos Menara sehingga pandangan petugas pengamanan belum mencapai ke semua titik yang dianggap rawan, dan menyebabkan Petugas Pengamanan harus lebih ekstra menjaga titik-titik rawan yang belum

terpantau, dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan saat ini hanya memiliki 2 Pos Menara, sedangkan idealnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki 4 Pos Menara. Selain itu, kondisi Pos Menara yang layak digunakan hanya 1, sementara Pos Menara lainnya tidak dapat digunakan karena kondisi Pos Menara tersebut yang lebih rendah daripada bangunan kantor maupun blok hunian.

3. Jumlah WBP yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Jumlah WBP yang melebihi kapasitas juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dengan jumlah WBP yang mencapai 1000. Dimana yang seharusnya hanya memiliki kapasitas 215 orang. Jumlah WBP yang melebihi kapasitas bisa menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri, seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Jumlah WBP yang melebihi kapasitas juga akan berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para WBP untuk beristirahat dan beraktivitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak WBP dan menimbulkan permasalahan baru.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian berjudul *Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan*, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lembaga tersebut dan telah selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan klasifikasi kegiatan yang mencakup tiga aspek, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Namun, pelaksanaan pengamanan juga menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah kurangnya jumlah personel petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, terbatasnya jumlah pos menara penjagaan, serta kapasitas lembaga yang tidak memadai untuk menampung jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang melebihi kapasitas yang tersedia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2006.
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Statistik Penelitian Hukum*, Pustaka Satia, Bandung, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Sanggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2021.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2006.
- Indra Muchlis Adnan, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014.
- Muladi, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Sukanto, *Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum. Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), Jakarta, 1986.
- Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrument Internasional)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan-Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Artikel Jurnal

Doris Rahmat, dkk, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatab*, Jurnal Pranata Hukum, Nomor 2 Volume 3, 2021.

Haris Budiman & Nopa Arisyana, *Implementasi Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Unifikasi, Nomor 2 Volume 4, 2017.

Fitri Wahyuni, *Tinjauan Terhadap Pembebasan Narapidana Pada Kondisi Covid 19*, Jurnal Das Sollen, Vol 4 No 1 tahun 2020

Sofiani Fajriah, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, No. 1 Vol. 7, 2019.

Internet

<https://etd.umm.ac.id/3052/3/BAB%2011.pdf>

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf.

<http://repository.unissula.ac.id/12056/3/babI.pdf>